



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

NOMOR SOP	: 437.61/06/01
TGL. PEMBUATAN	: 14-08-2020
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 18-08-2020
DISAHKAN OLEH	<p align="center">KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p>  <p align="center">Drs. SISWADI APRILIANTO, M.M NIP. 19610430 199403 1 002</p>
NAMA SOP	Penerbitan SP2D

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Gresik 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan perundangan tentang retribusi daerah Memahami peraturan perundangan tentang pajak daerah Memahami peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pencairan Gaji - SOP Pencairan GU/LS/TU/UP 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer ATK Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Jika SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka akan berpengaruh pada efektifitas proses Pencairan SP2D 	-



SOP Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

NOMOR SOP	437.61/06/01
TGL. PEMBUATAN	14-08-2020
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	18-08-2020

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		OPD	Petugas Loker	JFU	Kasubbid Belanja Daerah	Kabid Perbendaharaan	Bank Jatim	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pengajuan penerbitan SP2D	Start						-SPM -Dokumen Pendukung	1 Hari	-SPM -Dokumen Pendukung	
2	Petugas Loker menerima Surat Perintah Membayar (SPM) Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari OPD		Box					-SPM -Dokumen Pendukung		-Tanda Terima SPM -Register Penerimaan SPM	
3	JFU memverifikasi SPM, kelengkapan dokumen dan Kebenarannya (Membuat konsep Surat Penolakan Penerbitan SP2D atau Membuat Konsep SP2D) a jika setuju dibuatkan konsep SP2D b Jika tidak setuju dibuatkan konsep Surat Penolakan Penerbitan SP2D			Decision				Cecklist Kelengkapan Dokumen SPM		Konsep SP2D dan Konsep Surat Penolakan Penerbitan SP2D	
4	Kasubid Belanja Daerah Meneliti Konsep SP2D a Jika setuju memberikan paraf pada konsep SP2D dan diteruskan kepada Kabid Perbendaharaan b Jika tidak setuju dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki atau dikembalikan ke Loker untuk dikembalikan ke OPD dengan Surat Penolakan Penerbitan SP2D.				Decision			Konsep SP2D dan Konsep Surat Penolakan Penerbitan SP2D		Konsep SP2D dan Konsep Surat Penolakan Penerbitan SP2D	
5	Kabid Perbendaharaan memeriksa SP2D a Jika setuju menandatangani SP2D. b Jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubid Belanja Daerah untuk diperbaiki,					Decision		Konsep SP2D		SP2D	
6	Kasubbid Belanja membuat Daftar Pengujian secara fisik dan online untuk pengiriman ke Bank Jatim					Box		SP2D		SP2D	SP2D rangkap 6 -3 Rangkap untuk Bank Jatim -1 Rangkap untuk SKPD -2 Rangkap untuk diarsip ke Bidang Perbendaharaan
7	Bank Jatim memvalidasi dokumen						Box	SP2D	1 Hari	SP2D	
									2 Hari		